

BerAKHLAK

Sumberdaya Berakhlak sebagai mitra pembangunan
sustainable untuk masyarakat

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN GENDER

DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga dapat terselesaikan penyusunan buku "Profil Gender Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2025".

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi terkait pengarusutaraan gender pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2025. Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai Komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender khususnya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

Dalam penyusunan buku ini perlu adanya dukungan atau bantuan yang diberikan dari berbagai pihak terkait, untuk itu Kami sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Kami menyadari bahwa penulisan buku Profil Gender ini masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian, oleh karena itu Kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan kedepannya dan semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Surabaya.

Surabaya, Januari 2025

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,

Ir. Aniek Sugiharti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196709101990222001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 DASAR HUKUM	2
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sasaran	4
I.5 Ruang Lingkup	5
I.6 Kerangka Konseptual	5
 BAB II PELAKSANAAN PUG DI DKPP	7
II.1 PROGRAM DAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	7
II.2 PEMENUHAN DAN IMPLEMENTASI PRASYARAT PUG	19
II.3 HASIL/DAMPAK PELAKSANAAN PUG	24
 BAB III KESIMPULAN DAN PENUTUP	27
III.1 KESIMPULAN	27
III.2 RENCANA TINDAK LANJUT	28
III.3 PENUTUP	28
BAB IV	
BAB V	
 LAMPIRAN :	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bioma Pemahaman Gender	5
Gambar 2.1 Pelatihan Budidaya Air Tawar dan Payau	8
Gambar 2.2 Pelatihan Perikanan Police Mandiri	8
Gambar 2.3 Pelatihan Perikanan Probojati	9
Gambar 2.4 Pelatihan Takipol di DKPP	10
Gambar 2.5 Pelatihan Hidroponik di DKPP	11
Gambar 2.6 Pelatihan Budidaya Ternakur Serut dan Raman Unggulan di Kecamatan Sukoharjo	12
Gambar 2.7 Pelatihan Budidaya Ternakur Serut dan Raman Unggulan di Kecamatan Sukoharjo	13
Gambar 2.8 Pelatihan Budidaya Maget	14
Gambar 2.9 Pelatihan Budidaya Ayam Kampung	15
Gambar 2.10 Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan	16
Gambar 2.11 Vaksinasi Hewan Unggan	16
Gambar 2.12 Pengobatan jala Hewan Ternak	17
Gambar 2.13 Pelatihan Olahan Pangan	18
Gambar 2.14 Sosialisasi Gambaran dan Sayur	18



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil pelaksanaan PUG di DKPP	25
--	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan pada era *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dengan kata lain yaitu adanya kemitraan antara laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan kesetaraan dan keadilan pada setiap sektor pembangunan. Kesetaraan Gender lebih diartikan sebagai kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang sehingga kesetaraan gender bukan hanya diartikan dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sedangkan Keadilan Gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak ada pembakuan peran, tatanan gender, subditensi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Tujuan dari Kesetaraan Gender adalah dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol dan manfaat berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan perolehan hasil sumber daya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional tujuan setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan

pengrusutamaan gender guna terlenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Di tingkat Pemerintah Daerah Implementasi PUG telah diperkuat dengan dikeluarkannya Permentagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah yang isinya mengamanatkan kepada setiap pemerintahan daerah untuk melaksanakan PUG, diantaranya dengan membentuk kelompok kerja PUG (Pokja PUG) di setiap pemerintahan daerah dan focal point di tingkat instansi/lembaga.

Untuk Kota Surabaya Implementasi PUG telah diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pengrusutamaan Gender di Kota Surabaya. Aturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan PUG, diantaranya adalah perencanaan (analisa gender dalam RPJMD, Rencana Perangkat Daerah, Rencana Perangkat Daerah), pelaksanaan (Pembentukan Tim Pokja PUG, Tim Penggerak PUG dan Focal Point), pelaporan pemantauan dan evaluasi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis gender. Terkait dengan hal tersebut, maka disusunlah buku **"Profil Gender Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2025"** sebagai gambaran pelaksanaan pengrusutamaan gender (PUG) yang tercermin pada program atau kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya tahun 2024.

1.2 DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengrusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
2. Permentagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengrusutamaan Gender di Daerah;
3. Permentagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lajepan Lajepan, Lajepan

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1346)
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 615)
- f. Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Penguatan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) melalui Surat Edaran Bersama Menteri Bepereus/PPN No.270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 030/4379A/2012 dan Menteri PP&PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- h. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 19 Seri E1).
- i. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E).
- j. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.
- k. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).
- l. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.
- m. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender.

- n. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Ketidukliran, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
- o. Keputusan Walikota Nomor 188.45/1464/36.1.20022 tentang Kelompok Kerja Pengrusutamaan Gender Kota Surabaya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan buku **"Profil Pengrusutamaan Gender Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Tahun 2025"** adalah sebagai acuan bagi para pemuncu dalam menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dalam program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan T (tjukt) Prosyarat Pengrusutamaan Gender. Adapun Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Konsep Pengrusutamaan Gender sinergis dengan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Sebagai acuan dan pedoman data gender dalam melakukan kerja-kerja perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, program yang mengangku tema gender;
3. Menyatakan pangsai para pemuncu kebijakan dan pemuncu dalam menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang responsif gender;
4. Sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan PUG dan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Gender di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di masa mendatang.

1.4 SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari penyusunan buku profil ini adalah terwujudnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sedangkan sasaran pemanfaatan panduan ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang terdapat dalam Pokja PUG Kota Surabaya, serta sebagai pedoman bagi Focal Point pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

1.5 RUANG LINGKUP

Pembahasan dalam buku profil pelaksanaan Gender ini meliputi:

1. Pelaksanaan PUG melalui tujuh prasyarat PUG di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Manfaat pelaksanaan PUG baik internal Peningkat Daerah (PD) maupun masyarakat.

1.6 KERANGKA KONSEPTUAL

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemertisan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Berikut skema pemahaman terkait gender dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Skema Pemahaman Gender

Dalam mencapai kesetaraan gender, pemerintah telah mengupayakan melalui pengarusutamaan gender yang harus dilaksanakan oleh seluruh

Kementerian dan Lembaga, melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Pemerintah telah melakukan upaya dengan menyusun strategi yang harus menjadi acuan seluruh kementerian/lembaga, terwujud dalam RPJMD maupun RENSTRA tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya seluruh instansi dalam melakukan urusan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus memasuikan pertimbangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan, agar masing-masing menerima manfaat yang setara dan sesuai dengan peran, fungsi dan statusnya. Harapan dari proses PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bahwa setiap sektor mampu mengatasi isu yang ada, bahkan diharapkan menjawab isu kesenjangan yang muncul di setiap sektor pembangunan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

II.1 PROGRAM DAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER

Adapun pelaksanaan program dan sub kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 yang responsif gender adalah sebagai berikut:

II.1.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari program ini adalah pada sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (1201)

Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah pelaku usaha perikanan yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender tahun 2024 dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Tata Kelola Pemanfaatan Jasa Ikan yang di Lindungi dan atau Appendix Cikan di Sentra Ikan Hias;
2. Pembinaan Peningkatan Motivasi kerja Bagi Pelaku Usaha dan Wahana di Adventureland Romokalisari
3. Sosialisasi dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pelaku Usaha Sentra Ikan Hias Gunungpati.

Pelatihan ini direncanakan dilakukan pada:

Waktu : April sd September 2024

Lokasi : 1. Adventure Land Romokalisari (ARL)
2. Sentra Ikan Hias (SIH)

Target : 100 pelaku usaha

Pagu Indikatf : Rp. 2.498.457.133,-

Kelompok Sasaran,... Pelaku Usaha di Adventure Land Romokalisari (ARL)
dan Sentra Ikan Hias (SIH)

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini dihadiri sebanyak 180 peserta yang terdiri dari 120 orang laki-laki dan 60 orang perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan pengetahuan terkait tata kelola Pemanfaatan Jeres Ikan yang akan di lindungi dan atau Appendix Cites di Sentra Ikan Hias; 2) Meningkatkan Motivasi Kerja bagi Pelaku Usaha dan Wahana di Adventure Land Romokalisari 3) Memberikan Pengetahuan Lebih terkait Peningkatan Administrasi Pemerintahan NB.



Gambar 2.1 Pelatihan pemberian motivasi untuk meningkatkan minat pelaku usaha di Adventure Land romokalisari dan Peningkatan Pengurusan NB



Gambar 2.2 Pelatihan pemasaran melalui untuk meningkatkan omzet pelaku usaha di Sentra Ikan Hias dan Perikanan Pengurus NIS



Gambar 2.3 Sosialisasi terkait ikan yang yang boleh diperjualbelikan dan tidak diperbolehkan diperjualbelikan di Sentra Ikan Hias (SIH)

3.1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. Sub Kegiatan Pembinaan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (1042)

Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan Pengrusutamaan Gender tahun 2024 dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Pelungutan Hama dan Penyakit Ikan, Pelatihan Pembuatan Produk untuk Budidaya Ikan Air Tawar/Payau, Pelatihan Pemijahan/Pembesihan Ikan Iala dan Nila, Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Mandiri, Pelatihan Budidaya Ikan (Jala, Nila, Bandeng) dan Kepiting Apartemen
- Pemberian, Pendampingan, dan Monitoring Terkait Teknologi budidaya ikan pada kelompok Pembudidaya Ikan Surabaya.

Bulan	: Februari - Maret 2024, Mei - Oktober 2024
Lokasi	: Kelurahan yang menduduki wilayah pembudidaya perikanan
Target	: 35 Kelompok
Pagu Indikatif	: Rp. 437.836.000,-
Kelompok Sasaran	: Pembudidaya ikan di Kota Surabaya

Berdasarkan data terlampir pada tahun 2024 kegiatan ini dihadiri sebanyak 57 kelompok/ 1.025 orang yang terdiri dari 1.007 orang laki-laki dan 118 orang perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan produktivitas secara Kondision dengan hasil yang layak dipasarkan



Gambar 2.4 Penelitian Pembuatan Probiotik untuk Budidaya Ikan Air Tawar/Payau

2. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (1021)

Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu Jumlah Bantuan Sarana Perikanan Budidaya yang terjamin dan tersedia untuk nelayan pembudidaya ikan. Pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender tahun 2024 dari sub kegiatan ini adalah Bantuan Sarana untuk perikanan budidaya kepada Kelompok/orang Pembudidaya Ikan oleh nelayan yang terproduksi konsisten dengan layak di pasaran

Bulan	: Triwulan 4
Lokasi	: Kota Sumbawa
Target	: 442 Orang
Pagu Indikatif	: Rp. 1.088.446.362,-
Kelompok Sasaran	: Pembudidaya Ikan di Kota Sumbawa

Berdasarkan data terdistribusi pada tahun 2024 kegiatan ini sebanyak 442 Orang laki-laki yang mendapat bantuan Sarana pembudidaya ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan produktivitas secara Konsisten dengan hasil yang layak dipasarkan



Gambar 2.3 Bantuan Prototipe kepada Pembudidaya perikanan

3.1.3 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Pengawasan Usaha Perangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota (1047)

Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu Tercapainya Pengawasan Usaha Perangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan Pengrusahtamaan Gender tahun 2024 dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Pengawasan Kawasan Pesisir dengan melakukan kegiatan Patroli bersama di Sepanjang Pesisir pamarboya dan Teluk Lamong sebanyak 12 kali
- Tercapainya pelaku Usaha Perangkapan Ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota .

Bulan : Januari sd Desember 2024

Lokasi : Kawasan Pesisir Surabaya

Tingkat : 12 kali

Pagu Indikatif : Rp. 267.017.600,-

Kelompok Sasaran : Nelayan Kota Surabaya

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini dihadiri sebanyak 1768 Orang yang terdiri dari 1762 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) Mengurangi Kasus nelayan yang Menggunakan Alat Tangkap yang tidak ramah Lingkungan.



Gambar 2.3 Patroli Pengawasan Perikanan Tangkap Di Kawasan Pantai Pantai Surabaya

8.1.4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (SUS)

Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah sarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia. Pelaksanaan kegiatan Pengrusakan Gender tahun 2024 dari sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya Sarana Usaha perikanan bagi nelayan / keluarga nelayan serta SDM yang Memiliki wawasan terkait perikanan tangkap maupun pengolahan hasil perikanan.

Bulan	: Triwulan 3 dan 4
Lokasi	: Kota Surabaya
Target	: 60 Unit
Pagu Indikatif	: Rp. 1.648.320.756,-
Kelompok Sasaran	: Nelayan Kota Surabaya

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini yang mendapatkan bantuan sarana Usaha Perikanan Tangkap sebanyak 60 nelayan yang terdiri dari 60 orang laki-laki. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan pendapatan nelayan melalui Pengolahan Hasil Perikanan.



Gambar 2.3 Bantuan Sarana Peralatan Untuk nelayan melalui Pelatihan Laminasi Perahu

II.1.5 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (367)

Sub Kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Hidroponik
2. Pelatihan Teraspot (Tanaman sayuran dalam pot)
3. Pelatihan Pengembangan Usaha
4. Pelatihan Diversifikasi Usaha

Pelatihan tersebut direncanakan dilakukan pada:

Bulan : Januari - Desember 2024

Lokasi : Kecamatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Sumbawa

Target : 4 Laporan Kegiatan

Pagu Indikatif : Rp 2.753.199.543,-

Kelompok Sasaran : Masyarakat atau pembudidaya tanaman
di Kota Sumbawa

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini diarahkan sebanyak 500 peserta yang terdiri dari 317 orang perempuan dan 183 orang laki-laki. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkannya produktivitas pertanian, 2) meningkatkannya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya MRA agar menjadi mandiri dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan dampak budaya pertanian, 3) meningkatkan jumlah peserta pembinaan pengguna sarana pemanfaatan lahan pekarangan baik laki-laki maupun perempuan melalui pelatihan hidroponik dan teraspot secara baik dan benar, pelatihan pengembangan usaha dan diversifikasi usaha. Melalui metode teraspot masyarakat bisa menanam buah dan sayur dalam pot tanpa memerlukan lahan yang luas cukup memanfaatkan lahan pekarangan sekitar rumah, sedangkan metode hidroponik masyarakat bisa menanam sayuran dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah

dengan menekankan pada pemenuhan nutrisi bagi tanaman. Sehubungan dengan pelatihan pengembangan dan diversifikasi usaha masyarakat bisa meningkatkan alternatif usaha pertanian, sehingga diharapkan masyarakat bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.



Gambar 2.4 Berulas Garasi Prasarana Hicopani



Gambar 2.5 Foto pelatihan diversifikasi usaha

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (553)

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah Pendampingan Budidaya dan pengelolaan Lahan beserta Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan Pengelolaan Lahan Awar BTKD dengan Bantuan Sarana Produksi Budidaya Pertanian ;
2. Pemberian Bantuan Sarana Produksi Budidaya terasap (Cangkul, Sabit, Benih jagung Manis, bayam, tomat kerkung Sowi dan terong) .

Jadwal kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada

Bulan : Januari – September 2024

Lokasi : 16 lokasi (Lahan Hutan Kota dan BTKD)

Tingkat : 16 Laporan

Pagu Indikatif : Rp. 106.854.246,-

Sasaran : Masyarakat MBR

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini dilaksanakan di 16 Lokasi yang terdiri dari 11 Lokasi Hutan Kota dan 5 BTKD yang selanjutnya di kelola oleh . Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan membimbing warga MBR Pataikarya agar mampu bekerjasama di Bidang ekonomi secara berkelompok agar kesejahteraan warga meningkat.



Gambar 2.4. Pemantapan Lahan Pertanian Lahan BTKD oleh warga MBR

1. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (1216)

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah Pembudidayaan Peternakan yang memproduksi konsisten dengan hasil tryak di Pasarkan. Pelaksanaan pengrusakan gender dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan wawasan pengendalian konsumsi pangan ;
2. Penyusunan Laporan Pengawasan mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan Tanaman Skala kecil.

Jadwal kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan : Januari – Desember 2025

Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Tatura Gunungbelud dan Adventure Land Romokalisari.

Target : 12 Laporan

Pagu Indikatif : Rp. 3.403.990.817,-

Sasaran : Masyarakat MSB

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini dilaksanakan di 3 Lokasi yang terdiri dari 3. Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan wawasan pengendalian konsumsi pangan.



Gambar 2.4 Pengawasan mutu Benih/Bibit Ternak

II.1.E. Program Penyuluhan Pertanian

Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (485)

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan Kelembagaan Administrasi SKT ;
4. Pelatihan Teknik budidaya ramah lingkungan dan pengelolaan Keuangan Kelompok
5. Kegiatan pemberian bantuan sarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

Pelatihan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan : Mei – Agustus 2024

Lokasi : Kelompok tani pembudidaya pertanian Kota Surabaya

Target : 7 unit

Pagu Indikatif : Rp. 1.751.811.259,-

Kelompok Sasaran : Pembudidaya pertanian (petani) di Kota Surabaya

Berdasarkan data terdahulu pada tahun 2023 kegiatan ini di hadiri sebanyak 1.689 peserta yang terdiri dari 1.391 orang laki-laki dan 278 orang perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan produksi sektor pertanian; 2) meningkatkan jumlah peserta pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani laki-laki maupun perempuan dalam hal budidaya tanaman pangan dan hortikultura dengan sistem budidaya tanaman sehat dan ramah lingkungan. Bentuk kegiatan pelaksanaan pelatihan tersebut yaitu meliputi pelatihan pembuatan pupuk organik dan pembuatan pupuk organik sehingga aman bagi lingkungan. Selain itu juga adanya pemberian bantuan sarana produksi budidaya tanaman

pangan dan hortikultura, sehingga diharapkan masyarakat (pembudidaya pertanian) bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.



Gambar 2.3 Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur dan Rami di Lingkungan di Pasa

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (1164)

Suatu kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Surabaya. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dari suatu kegiatan ini adalah sebagai berikut melalui :

1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tertutup dengan Materi terupdate
2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dengan Materi terupdate 3
3. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Maksimal dengan Materi terupdate.

Pelatihan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan : Triwulan 2, 3 dan 4

Lokasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

- Target : 1 unit
 Pagu Indikat : Rp. 32.000.000,-
 Sasaran : 25 PPI, kota Surabaya

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini di hadiri sebanyak 25 Orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Pengetahuan lebih melalui Materi dan Praktek terkait ilmu ilmu Pertanian terpadu.



Gambar 2.6 Dokumentasi Praktek Pelatihan Budaya Pertanian

II.1.7 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Perencanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha produk Hewan

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan. Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Budaya Peternakan (budaya Sapi Potong, kambing dan Ayam) di Kecamatan atau Kelurahan;
2. Pelatihan Pembekalan Gernis yang mendapatkan Intervensi Budaya Ayam Pedaging untuk pemberdayaan masyarakat dalam program Padat karya di Kecamatan atau Kelurahan.

Pelatihan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan	: Januari - Desember 2024
Lokasi	: Dinas Kelahiran Pangan dan Pertanian
Tarjet	: 40 Unit Usaha
Pagu Indikatif	: Rp.1.146.547.034,-
Kelompok Sasaran	: Peternak di Kota Surabaya

Berdasarkan data terdahulu pada tahun 2024 kegiatan ini adalah jumlah pembudidaya ternak sebanyak 7 kelompok yang terdiri dari 34 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Sub-kegiatan ini bertujuan untuk memberi pembekalan dan intervensi budaya peternakan serta pendampingan secara langsung dengan petugas pengawas/pendamping yang diharapkan dapat membantu para peternak di Kota Surabaya untuk meningkatkan produktivitas ternaknya.



Gambar 2.8 Pelatihan Budaya Magrit di Kecamatan Krambengan



Gambar 2.9 Pengawasan dan Pendampingan unit usaha produk hewan

2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (613)

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. Pelaksanaan sub kegiatan pengrusakan gender dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengobatan hewan (lelak dan non lelak);
2. Vaksinasi hewan unggas;
3. Pemberian obat cacing pada hewan lelak;
4. Sosialisasi atau laksana pemotongan hewan kurban pada panitia pemotongan hewan kurban.

Sub kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan : Januari – Desember 2024

Lokasi : Klinik Hewan Ikan Daring dan tempat pemeliharaan ternak (rumah pemilik ternak)

TARGET : 12 Laporan

Pagu Indikator : Rp. 1.199.492.492,-

Kelompok Sasaran : Pemilik hewan di Kota Surabaya

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 sub kegiatan ini jumlah pemilik hewan ternak yang hewan ternaknya mendapat pengobatan sebanyak 1.172 orang pemilik hewan: yang terdiri dari 663orang laki-laki dan 438 orang perempuan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk: 1) mendorong daya saing dalam sektor peternakan; 2) meningkatnya produktivitas sektor peternakan melalui peningkatan kualitas kesehatan ternak; 3) meningkatnya frekuensi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan di Kota Surabaya baik pemilik hewan laki-laki maupun perempuan, sehingga diharapkan hewan yang dipelihara selalu dalam keadaan sehat.



Gambar 2.12 Pengobatan pada Hewan Ternak dan Pelayanan Puskesmas

II.1.8 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengembangaran konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari sub kegiatan ini adalah Pemantauan Ketersediaan dan Harga Komoditas Pangan di Kota Surabaya dan Penyusunan Laporan Monitoring Ketersediaan dan Harga Pangan Setiap bulan melalui Pelugas Survey.

Sub Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan	: Januari - Desember 2024
Lokasi	: Pasar Tradisional, Konvensional dan Distributor Kota Surabaya
Target	: 15 Laporan
Pagu Indikatif	: Rp.741.032.446,-
Sasaran	: Masyarakat Kota Surabaya

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini dibuktikan oleh petugas survey sebanyak 26 petugas yang terdiri dari 23 laki laki dan 3 perempuan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring ketersediaan dan Harga Pangan agar terpancasu stok dan Pasokannya serta Stabilitas harga pangan. Dalam sub Kegiatan ini juga memberikan informasi terkait pangan berupa Penyusunan Laporan Neraca Bahan Makanan, Laporan Pola Pangan Harapan dan Laporan Pola Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengenekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan diversifikasi bahan pangan di Kecamatan dan Kelurahan;
2. Sosialisasi GEMARUKAN (Gerakan Masyarakat Makan Ikan) dan Sayur di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Lomba cipta menu B2SA dan bahan ikan oleh Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.

Sub Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan	: Januari - Desember 2023
Lokasi	: Kelurahan atau Kecamatan
Target	: 24 kali
Pagu Indikatif	: Rp.1.093.804.472,-
Kelompok Sasaran	: Kader PKK dan Masyarakat

Berdasarkan data terdahulu pada tahun 2024 kegiatan ini dihadiri 72,28 % Perempuan dan 27,72% Laki Laki . Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkannya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat serta meningkatnya jumlah peserta pelatihan pengembangan diversifikasi pangan guna menambah pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (BQS&A), sehingga bermanfaat bagi kesehatan sekaligus dapat merekam ketergatalungan terhadap bahan makanan tertentu



Gambar GEMARKAN (Gerakan Masyarakat Makan Ikan) dan Sayur

II.1.3 Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu meningkatkan wawasan terkait Keamanan Pangan. Pelaksanaan sub kegiatan pengarusutamaan gender dari sub kegiatan ini adalah Pengambilan Sampel Pangan Segar dan Penilaian Keamanan Pangan Segar ..

Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan	: Januari - Desember 2024
Lokasi	: Pasar Tradisional, Konvensional dan Distributor Kota Surabaya
Target	: 15 Laporan
Pagu Indikatif	: Rp.777.769.288,-
Sasaran	: Masyarakat Kota Surabaya

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini dilakukan oleh petugas survey sebanyak 26 petugas yang terdiri dari 23 laki laki dan 3 perempuan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk monitoring ketersediaan dan Harga Pangan agar terjangkau oleh dan Pasokannya serta Stabilitas harga pangan. Dalam sub Kegiatan ini juga memberikan informasi terkait pangan berupa Penyusunan Laporan Neraca Bahan Makanan, Laporan Pola Pangan Harapan dan Laporan Pola Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

II.1.10 Program Pelatihan Usaha Pertanian

Pelaksanaan sub kegiatan pengrusutamaan gender dari program ini adalah sebagai berikut:

1. **Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.**

Sub kegiatan ini pada tahun 2024 memiliki indikator kinerja yaitu Pemberian Pelayanan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Teknis Izin Usaha Pertanian. Pelaksanaan sub kegiatan pengrusutamaan gender dari sub kegiatan ini adalah proposal yang mengajukan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha .

Sub Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan	: Januari - Desember 2024
Lokasi	: Kota Surabaya
Target	: 15 Laporan
Pagu Indikatif	: Rp.777.759.294,-
Batasan	: Petani, Peternak, Nelayan, Pelaku Usaha Mikro dan Profesi Dokter Hewan

Berdasarkan data terdapat pada tahun 2024 kegiatan ini dilakukan oleh 2 Petinggi yaitu Easlon II sebanyak 2 perempuan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya pemrosesan perizinan Usaha Lingkup Pertanian; terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian pertimbangan teknis izin usaha sector pertanian dan Periklanan tepat waktu; serta Terlaksananya Penertiban Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.

III.2 PEMENUHAN DAN IMPLEMENTASI PRA-SYARAT PUG

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender perlu memperhatikan beberapa komponen PUG yang harus dibangun terlebih dulu, yakni prasyarat dan komponen kunci yang dikenal dalam 7 (tujuh) Prasyarat PUG antara lain yaitu Komitmen, Kebijakan, Ketenagaan, Sumber Daya dan Anggaran, Sistem Data, Alat Analisa dan Pemantauan Serta Masyarakati. Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri, berikut penjelasan 7 (tujuh) prasyarat PUG di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai berikut:

1. KOMITMEN

Prasyarat pertama dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah komitmen. Komitmen yang dimaksud merupakan komitmen para pimpinan dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Komitmen dapat bisa dibuktikan dengan tersedianya keputusan tentang Pengarusutamaan Gender:

Membangun komitmen bagi para pemimpin keputusan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada khususnya adalah menjadi sangat penting agar pelaksanaan PUG dapat berjalan dengan baik. Komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya diindikasikan melalui terbitnya beberapa Keputusan Walikota Surabaya yang memberikan arah dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan PUG selain peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun peraturan perundangan tersebut antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 57 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
- c. Keputusan Walikota Nomor 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam rangka membangun komitmen untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pelayanan, maka menyusun Pelugas Focal Point. Focal Point

PUG bertugas untuk memfasilitasi pengrusutamaan gender ke setiap unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

2. KEBIJAKAN

Sebelum adanya komitmen sebagai pondasi atau dasar pelaksanaan pengrusutamaan gender diperlukan kebijakan untuk bisa diterjemahkan ke dalam suatu program. Penyusunan kebijakan dan program yang responsif gender menjadi komponen awal PUG yang harus dilakukan dalam mengawali pelaksanaan PUG di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya. Salah satu dokumen penting yang bisa mengantarkan kebijakan dan program adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan hasil deployment dari RPJMD Kota Surabaya. Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab 3.1 tentang program dan sub kegiatan responsif gender pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya tahun 2024, maka terdapat beberapa program yang responsif gender, diantaranya :

- a. Program Pendidikan Perikanan Budidaya
- b. Program Pendidikan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- e. Program Pendidikan dan Pemasyarakatan Hasil Perikanan
- f. Program Penyuluhan Pertanian
- g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- h. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- i. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- j. Program Petizian Usaha Pertanian

3. KELEMBAGAAN

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ditandai dengan telah terbentuknya kelembagaan pengarusutamaan gender sejak tahun 2011 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/27436.1.2011 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.

Dalam Keputusan Walikota diatas juga dibentuk unit PUG yaitu terdiri dari semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam upaya mendukung terlaksananya program untuk mengatasi kesetaraan gender maka perlu adanya kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG. Penguatan kelembagaan PUG harus mendapat perhatian yang lebih serius, sehingga pemahaman terhadap PUG begitu penting untuk dipahami dan diterapkan dalam mewujudkan program kegiatan yang tepat sasaran. Untuk mendukung kegiatan responsif gender diperlukan adanya:

- a. Adanya Pokja PUG (termasuk membentuk focal point PUG)
- b. Adanya Rencana Tahunan Pokja PUG
- c. Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG (menyusun profil gender)

Hal ini juga yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mendukung PUG yaitu :

- a) Bekerja sama dengan pokja di Pemerintah Kota Surabaya (DP3A-DPKB dan Bapetahbang);
- b) Pembentukan focal point gender;
- c) Penguatan kapasitas sumber daya manusia di OPD;
- d) Penyusunan profil gender.

Pelaksanaan PUG di lingkungan DKPP Kota Surabaya dilaksanakan oleh seluruh pejabat terkait penyusunan kebijakan dan anggaran yang responsif gender. Adapun Focal Point Pengarusutamaan Gender (Focal Point PUG) di DKPP Kota Surabaya dibentuk guna percepatan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, sehingga integrasi konsep gender ke dalam program kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

4. SUMBER DAYA DAN ANGGARAN

Dalam memenuhi Sumber Daya untuk meningkatkan PUG di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maka diperlukan adanya Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, ketrampilan dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG di antaranya, misalnya Focal point OPD dan Tim teknis gender OPD. Sumber Daya Manusia di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga non PNS (outsourcing), tenaga harian lepas (TGL) Kementerian Pertanian dan Penyuluh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyusunan anggaran dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG). Untuk menyusun anggaran yang responsif gender (ARG), bagian perencanaan di masing-masing OPD harus menyusun anggaran yang mampu mengakomodasi kesulitan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesadaran terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Sumber data dan sarana yang memadai untuk melaksanakan PUG dan anggaran yang responsif gender dapat mengurangi kesenjangan gender misalnya pembangunan toilet khusus laki-laki dan perempuan.

5. SISTEM DATA

Dalam melakukan analisis gender untuk membuat kebijakan dan menyusun program kegiatan yang responsif gender, harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan akurat. Untuk mendapatkan sistem informasi data diperlukan adanya data terpilah yang telah dikelompokkan menurut jenis kelamin, status serta kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh sektor bidang.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga melakukan penyusunan data terpilah dari beberapa kegiatan yang responsif gender. Data terpilah tersebut berisi para pembudidaya pertanian, pembudidaya perikanan, peternak, dan masyarakat yang terkait lainnya untuk mendukung program dan kegiatan dinas. Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan buku Profil Gender Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah :

1. Data primer :

Data yang dikumpulkan dari Bidang Pertanian, Bidang Perikanan, Bidang Pangan dan Bidang Peternakan.

2. Data sekunder :

Data atau informasi yang diperoleh dari pembudidaya perikanan, peternak, petani serta masyarakat yang terkait lainnya.

6. ALAT ANALISIS

Alat analisis terkait pengarusutamaan gender untuk mengidentifikasi isu gender dan memuat anggaran responsif gender yaitu dengan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Action Budget (GAB) dan Term Of Reference (TOR). Proses ini diperlukan untuk mengorganisir data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 menyusun GAP, GAB dan TOR pada sub kegiatan sebagai berikut :

- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- Pengawasan usaha penangkaran ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembiayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Perikanan;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendukung Pertanian Lainnya
- Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan;
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;

- l. Pengawasan Mutu Bersih/Sikat Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Tanaman Skala Kecil
- m. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian/ragangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- n. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota
- o. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Sisk, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
- p. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

J. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEGIATAN INOVASI

Upaya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mendorong partisipasi PUG yaitu :

- a. Mendorong terwujudnya Partisipasi dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- b. Menyusun Buku Profil Gender Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- d. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran peringkat daerah yang responsif gender;
- e. Melakukan pelatihan, sosialisasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja.

Pelaksanaan kegiatan PUG yang dilakukan untuk mendorong responsif gender pada sub-kegiatan yang sudah ada di masyarakat yaitu :

- a) Memberikan pelatihan budidaya (air tawar dan payau), pelatihan pembuatan pakan mandiri di Kecamatan atau Kelurahan dan pelatihan pembuatan probiotik (tambahan suplemen ikan) serta memberikan pendampingan kepada pembudidaya ikan pada bidang perikanan;
- b) Melakukan Pengawasan terkait Penangkapan Ikan yang aman.

- c) Memberikan Bantuan Kepada Kelompok yang Konsisten dalam berbudidaya Perikanan Peternakan dan Pertanian
- d) Memberikan pelatihan (hidroponik, tabulapot, takapoti), pelatihan pengembangan dan diversifikasi usaha pertanian serta memberikan pendampingan kepada pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura pada bidang pertanian;
- e) Memberikan pelatihan budidaya peternakan (budidaya ayam kampung, budidaya magot sebagai pakan alternatif) di Kecamatan atau Kelurahan serta pelatihan olahan hasil peternakan (pembuatan krupuk) serta pendampingan kepada peternak pada bidang peternakan;
- f) Memberikan pengobatan hewan (ternak dan non ternak), vaksinasi hewan unggas untuk masyarakat/peternak di Kota Surabaya dan sosialisasi tata laksana pemotongan hewan kurban pada panitia pemotongan hewan kurban;
- g) Memberikan pelatihan diversifikasi olahan pangan kepada masyarakat Kota Surabaya, melakukan sosialisasi gotarukon (gerakan memasyarakat makan ikan) dan sayur di Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan Lomba Cipta Menu B2SA dan Olahan Ikan oleh TP PKK Kota Surabaya;
- h) Memberikan wawasan terkait Pengawasan Pangan;
- i) Memberikan Wawasan Terkait Perizinan Usaha Pertanian

8. HASIL DAMPAK PELAKSANAAN PUG

Hasil Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Gender (PUG) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelaksanaan PUG dapat dilihat dari realisasi capaian output indikator kinerja pada tahun sebelumnya. Berikut adalah capaian indikator kinerja sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

[illegible]

BAB III

KE Simpulan dan Penutup

III.1 KE Simpulan

Pemerintah 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya dan Anggaran, Sistem Data, Alat Analisis dan Person Serta Masyarakat sangat penting untuk mewujudkan penerapan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan menggunakan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GAB (Gender Action Budget) dan Term Of Reference (TOR) pada kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) digambarkan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

PPRG merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja dimana pengalokasian anggaran menggunakan analisis gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, keseimbangan ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Anggaran Responsif Gender (ARG) mengadopsi secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja lebih berkualitas, maka untuk itu Dinas Kelautan Pangan dan Pertanian juga harus menyusun anggaran yang responsif gender (ARG) yang mampu mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kekuasaan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang berkelanjutan diperlukan juga komitmen yang tinggi dari pimpinan, komitmen ini dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang responsif gender, sehingga Peraturan-peraturan tentang pengarusutamaan gender agar dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan/ Peraturan/ Keputusan/ Surat Edaran di lingkup Dinas Kelautan Pangan dan Pertanian. Adapun pencapaian indikator kinerja yang telah dijabarkan pada tahap sebelumnya Dinas Kelautan Pangan dan Pertanian

telah melakukan setiap tahapan perencanaan dan penganggaran response gender pada lingkaran program dan sub kegiatan. Beberapa kendala yang masih muncul pada saat penyusunan perencanaan dan penganggaran response gender diantaranya adalah

- a. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap konsep kegiatan yang sebenarnya sudah berwawasan gender;
- b. Ketersediaan data terdapat pada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan.

III.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut implementasi PUG Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dicaplokkan dalam Kabupaten/Kota;
2. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
4. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
5. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
6. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
7. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
8. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

9. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemasaran Pendukung Pertanian Lainnya
10. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
11. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
12. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
13. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemasaran Sisk, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
14. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
15. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengaturan/pengelolaan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
16. Melakukan evaluasi terhadap Sub Kegiatan Penelitian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.

III.3 PENUTUP

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang dilaksanakan guna mencapai keadilan dan kesetaraan gender. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pencapaian pelaksanaan PUG, maka perlu dilakukan pemantauan dari masing-masing bidang dalam sebuah Perangkat Daerah melalui penyusunan dan penibahan buku profil pelaksanaan PUG secara reguler dan terukur. Buku profil pelaksanaan PUG ini merupakan bentuk nyata penujutan Perangkat Daerah yang Responsif Gender dan bagaimana sebuah Perangkat Daerah mampu menjalankan proses PPRG dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan buku profil pelaksanaan gender ini diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Dinas Kelautan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, sehingga memungkinkan bagi para pengguna untuk dapat mengikuti dan menyempurnakannya.

KERALA DINAS,
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.



Ir. Aniek Supriatni, M.S.
Pemang Ungga Muda
NP 155725101256022301

